

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (C A L K)



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul selama satu periode laporan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul selaku Pengguna Anggaran bertugas menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, hutang dan akuitas. Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud diatas merupakan pencatatan atas transaksi keuangan di lingkungan OPD dan penyiapan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, tranfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan :

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Menyediakan informasi keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan. Sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk kepentingan masyarakat;

c) **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2022, adalah:

- a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan anggaran periode berjalan untuk membiayai seluruh belanja/pengeluaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian antara cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan peraturan perundang-undangan;
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan operasional yang dilakukan selama periode pelaporan;

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, yang dibagi dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

- Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan secara umum
 - 2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan
- Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 - 3.1 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Realisasi APBD
 - 3.1.1 Realisasi Belanja Instansi
 - 3.2 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 3.2.1 Aset
 - 3.2.2 Kewajiban
 - 3.2.3 Ekuitas Dana
- Bab IV Penjelasan atas Informasi-Informasi Non-Keuangan
- Bab V Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan secara umum

Pencapaian target kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak menangani bidang pendapatan sehingga pada Pos Pendapatan tidak ada penjelasan.

b. Belanja

Secara garis besar komposisi anggaran murni belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2022 terbagi menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi sebesar Rp17.317.484.495,- dan Belanja Modal sebesar Rp73.900.000,-. Setelah perubahan rincian anggaran menjadi Belanja Operasi sebesar Rp16.648.877.495,- dan Belanja Modal sebesar Rp316.032.000,-.

Realisasi untuk Belanja Belanja Operasi sebesar Rp14.738.920.052,- atau 88,53% dan Belanja Modal sebesar Rp309.896.572,- atau 98,06%

c. Pembiayaan

Pembiayaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak ada, sehingga tidak perlu penjelasan.

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Kendala dan Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya dalam aspek keuangan, yaitu dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya melaksanakan dikarenakan sistem yang tersedia belum dapat digunakan secara maksimal. Akan tetapi berkat kerja keras dan dedikasi semua pegawai, kendala dan hambatan dalam pengelolaan keuangan tahun anggaran 2022 dapat teratasi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat menyelesaikan

kegiatan yang telah direncanakan hingga akhir tahun 2022. Berikut penjelasan dari beberapa kegiatan yang realisasi keuangan:

No	Program Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (%)		Keterangan
		Target	Realisasi	Keu	Fisik	
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	354.868.000	354.845.500	99,99	100	
1.1	Penyelenggaraan Diklat Kaistimewan	354.868.000	354.845.500	99,99	100	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.786.411.363	7.554.313.887	85,98	100	
2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.750.000	4.740.000	99,79	100	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	5.341.000	5.332.000	99,83	100	
2.3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.037.580.790	5.889.532.038	83,69	100	
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.290.000	2.290.000	100	100	
2.5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.763.591	77.488.200	93,63	100	
2.6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.997.500	18.923.809	99,61	100	
2.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.017.700	50.864.250	95,94	100	
2.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.385.000	99,38	100	
2.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	498.602.000	495.213.833	99,32	100	
2.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	34.186.800	34.164.000	99,93	100	
2.11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	321.482.000	315.136.572	98,03	100	
2.12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.950.000	1.708.650	34,52	100	Kegiatan pengiriman paket per bulan sekitar 3-4 kali dengan biaya kirim kurang lebih @Rp. 30.000,00 padahal SHBJ sebelum perubahan sebesar Rp. 250.000,00
2.13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.350.000	3.463.878	41,48	100	Biaya tagihan telfon per bulan kurleb Rp. 20.000,00 padahal SHBJ sebesar Rp. 100.000,00
2.14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	195.520.000	175.610.485	89,82	100	
2.15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.332.032	189.231.816	98,9	100	

2.16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	324.847.950	288.229.356	88,73	100	
3	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	8.178.498.132	7.497.540.237	91,67	100	
3.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	598.393.100	268.631.000	44,89	100	Anggaran Rencana Pengadaan ASN Tahun 2022 adalah untuk formasi CPNS dan P3K. Tetapi kuota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat adalah formasi P3K Tenaga Kesehatan, Guru dan Tenaga Teknis. Proses seleksi untuk P3K Nakes dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (Kemenkes), BKPSDM Kabupaten hanya sebagai fasilitator, menerima hasil
3.2	Evaluasi Pemberhentian ASN	59.800.000	55.897.500	93,47	100	
3.3	Pengelolaan Data Kepegawaian	98.762.032	89.304.316	90,42	100	
3.4	Pengelolaan Mutasi ASN	11.125.000	10.835.000	97,39	100	
3.5	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	49.275.000	44.820.000	90,96	100	
3.6	Pengelolaan Promosi ASN	652.825.000	587.429.500	89,98	100	
3.7	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	14.500.000	13.750.000	94,83	100	
3.8	Pengelolaan Assessment Center	84.210.000	83.142.500	98,73	100	
3.9	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	634.720.000	598.850.000	94,35	100	
3.10	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	4.741.070.000	4.574.817.421	96,49	100	
3.11	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	17.062.500	15.930.000	93,36	100	
3.12	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	156.250.000	153.623.000	98,32	100	
3.14	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	577.657.500	518.147.500	89,7	100	
3.15	Pembinaan Disiplin ASN	127.980.000	127.517.000	99,64	100	

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, laporan keuangan terdiri dari: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul, yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan dengan rencana yang tertuang dalam pagu anggaran. Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2022 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah hanya meliputi komponen belanja operasi dan belanja modal.

Belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari anggaran Belanja Operasi sebesar Rp16.648.877.495,- terealisasi sebesar Rp. Rp14.738.920.052,- atau 88,53% dan Belanja Modal sebesar Rp316.032.000,- terealisasi sebesar Rp309.896.572,- atau 98,06%.

Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai Laporan Realisasi APBD pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

3.1. Perincian dan Pejelasan Pos-Pos Realisasi APBD

3.1.1 REALISASI BELANJA INSTANSI

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang tertuang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.964.909.495,- sampai 31 Desember 2022 realisasinya mencapai Rp15.048.816.624,- atau 88,71% dengan sisa anggaran sebesar Rp1.916.092.871,- atau 11,29%

Adapun perincian dari realisasi belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

1) Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN dan belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN. Total anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp7.193.440.790,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.035.792.038,- atau 83,91 %.

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2022

Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.439.076.890	3.352.211.018	75,52	1.086.865.872
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.598.503.900	2.537.321.020	97,65	61.182.880
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	155.860.000	146.260.000	93,84	9.600.000
TOTAL	7.193.440.790	6.035.792.038	83,91	1.157.648.752

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa meliputi belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja uang dan/atau jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/pihak masyarakat. Total anggaran untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp9.455.436.705,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp8.703.128.014,- atau 92,04 %.

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2022

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
Belanja Barang	3.322.804.641	3.135.768.465	94,37	187.036.176
Belanja Jasa	5.216.083.064	4.732.547.160	90,73	483.535.904
Belanja Pemeliharaan	209.160.000	164.049.385	78,43	45.110.615
Belanja Perjalanan Dinas	423.889.000	419.013.004	98,85	4.875.996
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	283.500.000	251.750.000	88,80	31.750.000
TOTAL	9.455.436.705	8.703.128.014	92,04	752.308.691

2) Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja barang/aset yang mempunyai manfaat/nilai pakai lebih dari satu tahun anggaran. Belanja modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli asset guna peningkatan

kinerja pelayanan kepada masyarakat. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun anggaran 2022 menganggarkan belanja modal sebesar Rp316.032.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp309.896.572,- atau 98,06 %.

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2022**

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
Peralatan dan Mesin	269.832.000	263.880.472	97,79	5.951.528
Gedung dan Bangunan	46.200.000	46.016.100	99,60	183.900
TOTAL	316.032.000	309.896.572	98.06	6.135.428

3.2. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

3.2.1. Aset

1) Kas

Pada tanggal 31 Desember 2022, Bendahara Pengeluaran telah melakukan tutup buku dan menyetorkan sisa kas yang ada pada Bendahara Pengeluaran sehingga posisi kas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp. 0,-

2) Persediaan

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo akhir persediaan adalah Rp2.905.325,-. Berikut rincian dari penerimaan dan pengeluaran persediaan selama Tahun 2022 :

No	Nama Barang	Saldo Awal 2022	Penerimaan Januari- Desember 2022	Pengeluaran Januari- Desember 2022	Saldo Akhir 2022
1	Bahan Bakar dan pelumas		222.282.456	222.282.456	

2	Alat Tulis Kantor	6.573.900	426.313.950	432.453.350	434.500
3	Kertas dan Cover	1.342.600	27.093.500	27.843.700	592.400
4	Benda Pos		3.000.000	3.000.000	
5	Bahan Komputer	6.475.500	34.195.100	39.633.600	1.037.000
6	Perabot Kantor	1.577.000	16.147.657	16.932.232	792.425
7	Alat Listrik		8.353.000	8.304.000	49.000
8	Perlengkapan Dinas		95.659.000	95.659.000	
9	Perlengkapan Perlindungan Olahraga		149.000	149.000	
10	Souvenir/Cenderamata		14.000.000	14.000.000	
11	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		11.106.102	11.105.102	
12	Obat		2.183.000	2.183.000	
13	Obat-obatan lainnya		399.000	399.000	
14	Natura		2.282.714.700	2.282.714.700	
TOTAL		15.969.000	3.143.596.465	3.156.659.140	2.905.325

3) Aset Tetap

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo akhir aset tetap adalah Rp1.287.198.045,84,-. Saldo akhir Gedung dan Bangunan sebesar Rp46.016.100 dipindahkan pencatatan pada Peralatan dan Mesin dengan dilakukan jurnal penyesuaian. Saldo Peralatan Mesin yang tergolong barang extra compatable tidak tercatat pada neraca sebesar Rp 5.328.000 yang tercantum di neraca hanya barang intra compatable sebesar Rp1.281.870.045,85. Berikut rincian dari mutasi aset tetap selama Tahun 2022:

No	Nama Inventaris	Saldo Awal	Mutasi		Penyusutan	Saldo Akhir
			Tambah	Hapus		
1	Tanah	0	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	4.718.208.762	1.131.572.072	523.256.368	4.070.497.327,16	1.256.027.138,84
	- Intra Compatable	4.711.916.762	1.131.572.072	522.292.368	4.070.497.327,16	1.250.699.138,84
	- Extra Compatable	6.292.000	0	964.000		5.328.000

No	Nama Inventaris	Saldo Awal	Mutasi		Penyusutan	Saldo Akhir
			Tambah	Hapus		
3	Gedung & Bangunan	0	0	0		0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.750.000	0	0		2.750.000
5	Aset Tetap Lainnya	28.178.050	242.857	0		28.420.907
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0		0
TOTAL		4.749.136.812	1.131.814.929	523.256.368	4.070.497.327,16	1.287.198.045,84

4) Aset Lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo akhir aset lainnya adalah Rp17.446.000, 00 Berikut rincian dari mutasi asset lainnya selama Tahun 2022:

Nama Inventaris	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Amortisasi	Saldo Akhir
Aset Tak Berwujud	159.258.400	54.860.000	196.6724.00	17.446.000
TOTAL	159.258.400	54.860.000	196.6724.00	17.446.000

3.2.2. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek Rp. 0,-

3.2.3 Ekuitas Dana

Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah nilai aset dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek. Pada tanggal 31 Desember 2022, Jumlah ekuitas dana sebesar Rp1.302.221.370,85

BAB IV

INFORMASI NON KEUANGAN

- a. Bentuk Hukum Pemerintah Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul dibentuk menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Kegiatan Operasional Pemerintah Kabupaten Bantul antara lain mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Nomor: 9 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022. Serta Peraturan Bupati Bantul nomor: 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dengan kedudukan sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, juga sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- d. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul diatur berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2021.
 - a) Kepala Badan ;
 - b) Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c) Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN, terdiri atas :
 - 1. Subkor Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ; dan
 - 2. Subkor Mutasi dan Kepangkatan.
- d) Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN, terdiri atas :
 - 1. Subkor Pengembangan Kompetensi ; dan
 - 2. Subkor Diklat.
- e) Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN, terdiri atas :
 - 1. Subkor Penilaian dan Pembinaan ; dan
 - 2. Subkor Penghargaan dan Kesejahteraan.
- f) Jabatan Fungsional.

BAB V P E N U T U P

Berdasarkan penjelasan dari pos-pos laporan keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Realisasi Belanja

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang tertuang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.964.909.495,- sampai 31 Desember 2022 realisasinya mencapai Rp15.048.816.624,- atau 88,71% dengan sisa anggaran sebesar Rp1.916.092.871,- atau 11,29%

b. Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bukan merupakan instansi penghasil pendapatan atau pendapatan sama dengan nol (Rp.0), tapi pengeluaran/belanja tetap harus dikeluarkan, sehingga selisih lebih dari total jumlah pengeluaran tersebut dinamakan SILPA. Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.916.092.871,-. Jumlah SILPA merupakan jumlah uang yang tidak dibelanjakan/diserap oleh OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama satu tahun anggaran, dalam hal ini dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2022. Jumlah tersebut terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

c. Aset

Aset yang tercatat di neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.302.221.370,85 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp2.905.325,00 Aset Tetap sebesar Rp1.281.870.046,85,- serta Aset Lainnya sebesar Rp17.446.00,00

d. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Lancar sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.905.325,- yang merupakan selisih dari Aset Lancar sebesar Rp. 2.905.325 dikurangi Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 0,-. Sedangkan untuk Ekuitas Dana Investasi sebesar 1.299.316.045,85,- adalah selisih Aset Tetap sebesar Rp.

1.281.870.045,85 dan Aset Lainnya sebesar Rp. 17.446.000,- dikurangi Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0,- .

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 s/d tanggal 31 Desember 2022, sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan yang sudah dipercayakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul. Laporan ini merupakan salah satu bahan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Bantul, 31 Desember 2022

Kepala BKPSDM

Kabupaten Bantul 



Ir. Isa Budihartomo, MT

NIP. 196805051996031003